



RESPONSIVITAS PEMERINTAHAN TERHADAP PENANGANAN KONFLIK INVESTASI DI JAWA TENGAH

Jaka Permana¹ Nurhayati², Endang³ dan Dian AM⁴
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Banten Raya
jakapermana109@gmail.com

Abstrak

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang paling luas di Pulau Jawa. Secara astronomis Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5° 40' - 8° 30' Lintang Selatan (LS) dan antara 108° 30' - 111° 30' Bujur Timur (BT) dan termasuk di dalamnya Kepulauan Karimunjawa. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak di antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di wilayah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi DIY dan Samudera Hindia di wilayah selatan. Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah administrasi sebanyak 29 wilayah kabupaten, 6 wilayah kota, 573 wilayah kecamatan, 750 wilayah kelurahan dan 7809 wilayah desa. Memiliki cakupan luas wilayah 32.800,69 k. Tujuan dari penelitian ini Untuk Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya responsivitas pemerintah dalam penanganan konflik investasi di Jawa Tengah. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan responsivitasnya dalam penanganan konflik investasi. Untuk menganalisis tingkat responsivitas pelayanan pengaduan masyarakat terhadap investasi di Jawa Tengah yang mengalami kemunduran yang memiliki hambatan problem lahan menjadi mahal. Hasil penelitian bahwa pemerintah meresponsivitas konflik tersebut dengan sangat terbuka. Hambatan-hambatan problem itu selalu ada kunci yang pertama adalah level dari bagaimana kepemimpinan daerah, menanggapi konflik ini sebagai akar dari segala keberhasilan sehingga konflik tersebut terpecahkan, pengelolaan investasi membuka lapangan konsep dari sektor swasta, sehingga pemerintah harus adil terhadap investor swasta maupun negeri terutama dalam hal pembelian tanah di masyarakat setempat sesuai dengan UUD yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: Konflik, Investasi, Jawa tengah, Semarang

Abstract

The Central Java Province is one of the largest province in Java Island. Astronomically, Central Java Province is located at 5° 40' - 8° 30' South Latitude (LS) and between 108° 30' - 111° 30' East Longitude (BT) and is included in the Karimunjawa Islands. Geographically, Central Java Province is located between East Java and West Java Provinces, directly curved by the Java Sea in the north and directly independent with the DIY Province and the Indian Ocean in the south. Central Java Province has an administrative area of 29 districts, 6 cities, 573 sub-districts, 750 urban villages and 7,809 village areas. Has a wide area coverage of 32,800.69 k. The purpose of this study is to increase understanding of the importance of government responsibility in handling investment conflicts in Central Java. To find out the efforts made by the Central Java government to increase its responsiveness in handling investment conflicts. To analyze the level of responsibility for public complaint services for investments in Central Java which are experiencing setbacks that have problem constraints that cannot be expensive. The result of the research is that the management of the governmental conflict is very open. There are always obstacles to the problem. The first key is the level of how regional leadership deals with this conflict as the root of all success so that the conflict is resolved. Investment management opens up the field of concepts from the private sector, so the government must be fair to private and public investors, especially in terms of purchasing land in the local community in accordance with the stipulated Constitution.

Keywords: Conflict, Investment, Central Java002C Semarang



PENDAHULUAN

Istilah investasi maupun penanaman modal adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat. Investasi digunakan sebagai istilah populer dalam dunia usaha. Sedangkan penanaman modal digunakan dalam istilah perundang-undangan. Dikalangan masyarakat luas, Investasi memiliki pengertian lebih luas karena mencakup investasi langsung (Direct Investment) dan Investasi tak langsung (portofolio Investment). Sedangkan penanaman modal lebih berkonotasi kepada investasi langsung. Penanaman modal menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia

Semarang yang terletak di pantai utara provinsi Jawa Tengah memiliki lokasi strategis. Semarang memiliki letak yang dekat dengan banyak kota besar serta infrastruktur yang layak. Selain jalan raya, Semarang juga terhubung dengan kota-kota Jawa lainnya melalui transportasi kereta. Selain itu, bandar udara internasional dan pelabuhan lautnya yang melayani destinasi domestik dan luar negeri mempermudah akses ke pasar-pasar terpencil. Untuk lebih menggalakkan perekonomian daerah, salah satu upaya yang dilakukan Ganjar adalah dengan menciptakan iklim investasi yang mudah, murah dan lancar di Jawa Tengah agar investor datang berbondong-bondong. Sebab investasi juga didorong Jokowi ke kepala daerah untuk menumbuhkan ekonomi nasional.

Untuk diketahui, Studi Luar Kampus yakni proses pembelajaran mahasiswa yang dilaksanakan di luar kelas atau langsung ke

lapangan yang berkaitan dengan mata kuliah yang dipelajari di kelas. Kunjungan kali ini didasari dengan keingintahuan Mahasiswa STISISP Banten Raya terkait pemerintahan provinsi Jawa Tengah terlebih mengenai layanan investasi dan keterbukaan publik di provinsi Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah sendiri merupakan provinsi yang mendapat titel terbaik pertama pada ajang Anugerah Layanan Investasi (ALI) tiga kali berturut-turut hingga tahun 2022 dan mendapat nilai tertinggi anugerah keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 kategori Pemerintah provinsi, untuk kelima kalinya (Simanjuntak, dkk., 2007).

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui responsivitas pemerintahan terhadap konflik di Jawa Tengah tentang hambatan problem lahan menjadi mahal, dan akhirnya investor menarik kembali, dan bergeser, karena hambatan-hambatan itu selalu ada, tetapi kembali kekunci yang pertama adalah level dimana kepemimpinan Daerah menangani konflik-konflik investasi yang ada di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong ke dalam metode kualitatif dan dikaji secara analisis deskriptif yang menjelaskan tentang responsivitas pemerintah daerah dalam upaya Responsivitas Pemerintahan Terhadap Penanganan Konflik Investasi Di Jawa Tengah. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Informan penelitian ini terdiri dari Sekretaris Daerah, Kominfo, BAPENDA, serta Beberapa Staf pada Dinas terkait yang mengetahui tentang responsivitas Pemerintah Daerah dalam upaya Responsivitas Pemerintahan Terhadap



Penanganan Konflik Investasi. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan key informan dan informan-informan susulan penelitian mengenai Responsivitas Pemerintahan Terhadap Penanganan Konflik Investasi dan instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti, data jumlah investor swasta dan negeri. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain wawancara (interview) yakni mengadakan wawancara langsung terhadap informan mengenai permasalahan yang akan diteliti, yakni Responsivitas Pemerintahan Terhadap Penanganan Konflik Investasi. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan Responsivitas Pemerintahan Terhadap Penanganan Konflik Investasi. Studi Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti yaitu Responsivitas Pemerintahan Terhadap Penanganan Konflik Investasi Responsivitas Pemerintahan Terhadap Penanganan Konflik Investas di Jawa Tengah.

PEMBAHASAN

Secara Teoritis Konsep Responsivitas

Menurut Blanchard (2001:20) Responsivitas adalah suatu kriteria dalam mengukur kinerja organisasi pelayanan publik. Mengemukakan bahwa

responsivitas atau daya tanggap adalah istilah populer digunakan dalam lingkup organisasi bisnis, dan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membantu pelanggan dalam memberikan jasa pelayanan dengan cepat. Responsivitas juga harus dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Strategi Pelaksanaan Responsivitas

Menurut Dwiyanto (2005), untuk meningkatkan responsivitas organisasi terhadap kebutuhan pelanggan, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Menerapkan Strategi KYC (*Know Your Customers*)

Merupakan sebuah prinsip kehati-hatian, yang dapat digunakan untuk mengenali kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebelum memutuskan jenis pelayanan yang akan diberikan. Namun dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, prinsip KYC dapat digunakan oleh publik untuk mengenali kebutuhan dan kepentingan pelanggan sebelum memutuskan jenis pelayanan yang akan diberikan.

b. Menerapkan Model *Citizen's Charter*

Citizen's charter (kontrak pelayanan) adalah standar pelayanan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi dari pelanggan, dan birokrasi berjanji untuk memenuhinya. *Citizen's charter* adalah suatu pendekatan dalam menyelenggarakan layanan publik yang menempatkan pengguna layanan atau pelanggan sebagai pusat perhatian. *Citizen's charter* pada dasarnya merupakan kontrak sosial antara birokrasi dan pelanggan untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Melalui kontrak pelayanan, hak dan kewajiban pengguna



maupun penyedia layanan disepakati, didefinisikan, dan diatur secara jelas. Prosedur, biaya, dan waktu pelayanan juga harus didefinisikan dan disepakati bersama, tentunya dengan mengkaji peraturan yang ada secara kritis.

Maksud dalam kutipan tersebut:

Responsivitas pemerintah merujuk pada kemampuan pemerintah untuk merespons dan mengatasi masalah yang timbul dari konflik investasi dengan cepat, efektif, dan adil. Responsivitas ini melibatkan sikap pemerintah dalam mengakui keberadaan konflik, mengumpulkan informasi, berkomunikasi dengan pihak terkait, dan mengambil tindakan yang tepat.

Konsep Konflik

Walgito, (2007: 147) mengemukakan Konflik adalah suatu situasi di mana dua orang atau lebih dua kelompok atau lebih tidak setuju terhadap hal-hal atau situasi-situasi yang berkaitan dengan keadaan, keadaan yang antagonis.

Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi, disebabkan oleh banyak faktor yang pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu dan kelompok yang memiliki sifat dan tujuan yang berbeda satu sama lain.

Jamil, (2007: 51) Menjelaskan bahwa Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak

pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konsep Investasi

Menurut Jogiyanto,(2017:11) investasi merupakan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien dalam periode waktu tertentu.2 Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Sejarah Jawa Tengah

Sejak abad VII, banyak terdapat pemerintahan kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah (Central Java), yaitu: Kerajaan Budha Kalingga, Jepara yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674. Menurut naskah/prasasti Canggal tahun 732, kerajaan Hindu lahir di Medang Kamulan, Jawa Tengah dengan nama Raja Sanjaya atau Rakai Mataram. Dibawah pemerintahan Rakai Pikatan dari Dinasti Sanjaya, ia membangun Candi Rorojonggrang atau Candi Prambanan. Kerajaan Mataram Budha yang juga lahir di



Jawa Tengah selama era pemerintahan Dinasti Syailendra, mereka membangun candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kalasan dan lain-lain.

Pada abad 16 setelah runtuhnya kerajaan Majapahit Hindu, kerajaan Islam muncul di Demak, sejak itulah Agama Islam disebarkan di Jawa Tengah. Setelah kerajaan Demak runtuh, Djoko Tingkir anak menantu Raja Demak (Sultan Trenggono) memindahkan kerajaan Demak ke Pajang (dekat Solo). Dan menyatakan diri sebagai Raja Kerajaan Pajang dan bergelar Sultan Adiwijaya. Selama pemerintahannya terjadi kerusuhan dan pemberontakan. Perang yang paling besar adalah antara Sultan Adiwijaya melawan Aryo Penangsang. Sultan Adiwijaya menugaskan Danang Sutowijaya untuk menumpas pemberontakan Aryo Penangsang dan berhasil membunuh Aryo Penangsang. Dikarenakan jasanya yang besar kepada Kerajaan Pajang, Sultan Adiwijaya memberikan hadiah tanah Mataram kepada Sutowijaya. Setelah Pajang runtuh ia menjadi Raja Mataram Islam pertama di Jawa Tengah dan bergelar Panembahan Senopati.

Di pertengahan abad 16 bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia dalam usaha mencari rempah-rempah yang akan diperdagangkan di Eropa. Pada saat yang sama, bangsa Inggris dan kemudian bangsa Belanda datang ke Indonesia juga. Dengan VOC-nya bangsa Belanda menindas bangsa Indonesia termasuk rakyat Jawa Tengah baik dibidang politik maupun ekonomi.

Di awal abad 18 Kerajaan Mataram diperintah oleh Sri Sunan Pakubuwono II, setelah beliau wafat muncul perselisihan diantara keluarga raja yang ingin memilih/menunjuk raja baru. Perselisihan

bertambah keruh setelah adanya campur tangan pemerintah Kolonial Belanda pada perselisihan keluarga raja tersebut. Pertikaian ini akhirnya diselesaikan dengan Perjanjian Ganti tahun 1755. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua kerajaan

yang lebih kecil yaitu Surakarta Hadiningrat atau Kraton Kasunanan di Surakarta dan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kraton Kasultanan di Yogyakarta.

Sampai sekarang daerah Jawa Tengah secara administratif merupakan sebuah propinsi yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 10/1950 tanggal 4 Juli 1950. Jawa Tengah sebagai salah satu Propinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua Propinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau Karimunj

wa). Secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota. Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80 persen) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah.

Menurut penggunaannya, luas lahan sawah terbesar berpengairan teknis (38,26 persen), selainnya berpengairan setengah teknis, tadah hujan dan lain-lain. Dengan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 69,56 persen.

Berikutnya lahan kering yang dipakai untuk tegalan/kebun/ladang/huma sebesar 34,36 persen dari total bukan lahan



sawah. Persentase tersebut merupakan yang terbesar, dibandingkan presentase penggunaan bukan lahan sawah yang lain.

Menurut Stasiun Klimatologi Klas 1 Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah berkisar antara 18°C sampai 28°C. Tempat-tempat yang letaknya dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Sementara itu, suhu rata-rata tanah berumput (kedalaman 5 Cm), berkisar antara 17°C sampai 35°C. Rata-rata suhu air berkisar antara 21°C sampai 28°C. Sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 73 persen sampai 94 persen. Curah hujan terbanyak terdapat di Stasiun Meteorologi Pertanian khusus batas Salatiga sebanyak 3.990 mm, dengan hari hujan 195 hari.

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi yang terletak di pulau Jawa. Jawa Tengah sebagai salah satu Propinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut: Pertama, Pemerintah dalam meresponsifitas konflik investasi di Jawa Tengah dengan sangat terbuka bahwasanya hambatan-hambatan problem itu selalu ada, kunci yang pertama adalah level dari bagaimana kepemimpinan daerah, menanggapi konflik ini sebagai akar dari segala keberhasilan sehingga konflik tersebut terpecahkan, pengelolaan investasi membuka lapangan konsep dari sector swasta.

Persoalan Konflik Investasi tanah adalah persoalan krusial dan kompleks yang tidak cukup di selesaikan tetapi dengan berlandaskan spirit hukum dan teori yang mengarahkan pemerintah menyelesaikan konflik investasi secara

terbuka, sehingga pemerintah mampu menyelesaikan konflik tersebut, pemerintah memberikan respon terhadap investor, dan juga pemilik tanah secara adil, sehingga konflik tersebut terselesaikan, hingga sekarang iklim investasi di Jawa Tengah semakin kompetitif dibanding provinsi lain.

Propinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau Karimunjawa). sebagai suatu Propinsi, Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh Jawa kecuali Vorstenkondeh (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah Syuu (Karesidenan), Si (Kotapraja), Ken (Kabupaten), Gun (Distrik), Son ConderDistrik dan Ku (Kelurahan)

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat –Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal dengan judul penelitian "Responsivitas pemerintah terhadap konflik investasi di Jawa Tengah". Dengan selesainya jurnal ini bukanlah menjadi akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup baru, penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya jurnal ini, tidak ada persembahan terbaik selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak



yang telah membantu penulis terutama kepada dosen pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

- Apdita Suci Nurani “Responsifitas pemerintah Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif New Public Service” WACANA Jurnal Sosial dan Humaniora Vol.18 No.4(2015)
<https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/320>
- Dwiyanto, Agus. 2006. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik” (<https://books.google.co.id>)
- Tangkisan, Nogis. 2005. “Manajemen Publik Jakarta”: Grasindo (<https://books.google.co.id>)
- Riadi, Muchlisin. (2022). *Responsivitas (Pengertian, Indikator, Prinsip dan Strategi)*. Diakses pada 7/10/2023, dari <https://www.kajianpustaka.com/2022/06/responsivitas.html>⁵
- Moch. Khafidz Fuad Raya Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang “Resolusi Konflik dalam Institusi Pendidikan Islam (Kajian Empirik dan Potensi Riset Resolusi Konflik)” Jurnal Pendidikan Islam Indonesia Archives /Vol 1 No 1 (2016): Pendidikan Islam
- Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001), hlm 1. (<https://books.google.co.id>)
- Jogiyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5 (<https://books.google.co.id>)
- Sejarah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id) PORTAL RESMI JAWA TENGAH
- BAPPEDA PROV. JATENGJL. Pemuda No.127-133, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132 Vol 20 No 2 (2022): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah. (jatengprov.go.id) PORTAL RESMI JAWA TENGAH
- Arifa Rachma Febriyani” KOMUNIKASI PEMBANGUNAN UNTUK IDENTITAS TEMPAT: BUDAYA KAMPUNG DI KOTA SEMARANG” Jurnal Komunikasi Pembangunan Vol. 18 (01) 2020 | 11-29 DOI: 10.22500/18202029003 Publikasi Online: 26 Februari
- MG. WESTRI KEKALIH IMPLEMENTASI ONE STOP SERVICES (OSS) DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI Riptek, Vol.2, No.1, Tahun 2008, Hal.: 14-17
IMPLEMENTASI_OSS_-_WESTRI.pdf (semarangkota.go.id)
- Profil Pimpinan - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jatengprov.go.id)
- Sumarno SE.MM” Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam Public Studi Luar Kampus di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pada Senin (03/07/2023)

